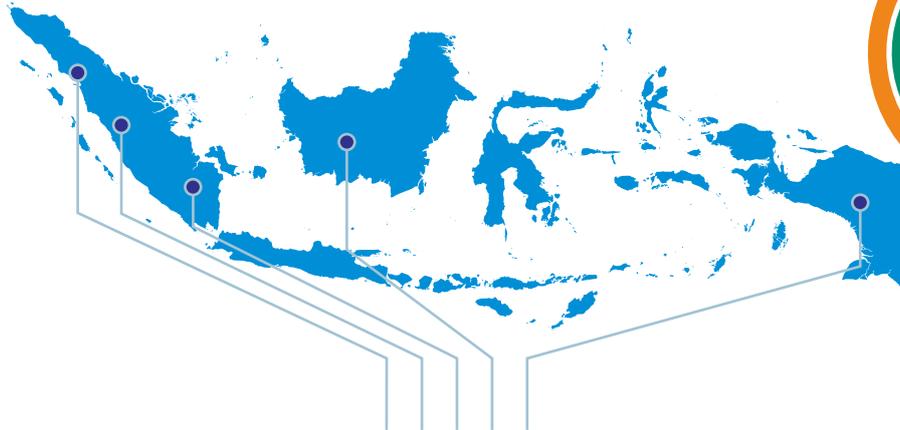


USER MANUAL

SISTEM REGISTRASI NASIONAL

PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM



SISTEM REGISTRASI NASIONAL



PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

Daftar Isi

Kata Pengantar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	iii
Kata Pengantar Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	v
I. Pendahuluan	1
A. Tentang SRN Pengendalian Perubahan Iklim	1
B. Mengukur Aksi Pengendalian Perubahan Iklim	1
C. Peran Sistem Registri	2
D. Tujuan SRN	2
E. Tujuan Penyusunan Manual SRN	2
II. Tampilan Portal SRN.	3
A. Halaman Beranda	3
B. Menu dan Halaman-Halaman Lain	7
III. Penutup	11

KATA PENGANTAR

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Perubahan iklim merupakan isu global yang harus ditangani bersama-sama oleh masyarakat global dan memerlukan keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam upaya mitigasi dan adaptasinya. Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim dan sekaligus sebagai negara tropis dengan luas hutan serta rawa-gambut yang signifikan, memiliki potensi tinggi baik sebagai sumber emisi (*source*) maupun sebagai sink. Indonesia sebagai negara peratifikasi Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protokol Kyoto, sangat berkepentingan dengan Perjanjian Paris. Perjanjian Paris yang disepakati pada COP-21 di Paris, Perancis, telah memasuki masa penandatanganan bagi Negara Pihak yang tergabung dalam Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC). Indonesia telah menandatangani Perjanjian Paris di New York, Amerika Serikat, tanggal 22 April 2016. Tingginya keterwakilan negara dalam penanda-tanganan Perjanjian Paris menunjukkan pentingnya perjanjian tersebut untuk menjaga kenaikan suhu bumi tidak melebihi 2°C dibandingkan era pra-industrialisasi.

Bagi Indonesia, Perjanjian Paris telah mengakomodasikan kepentingan nasional yang mendorong seluruh *stakeholder* untuk terciptanya pengaturan global yang mencerminkan keseimbangan, keadilan dan tidak menghambat pembangunan negara berkembang. Dalam pelaksanaannya, kewajiban negara maju dan negara berkembang disesuaikan dengan kemampuan nasional dan tersedianya dukungan pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang. Perjanjian Paris juga mencakup pentingnya upaya menurunkan emisi, adaptasi, pelestarian laut dan hutan, peningkatan energi terbarukan dan peran serta masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengendalian perubahan iklim yang selama ini diperjuangkan oleh Indonesia. Indonesia telah menyampaikan target penurunan emisi pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional. Sesuai Keputusan COP- 21 yang mengadopsi Perjanjian Paris, negara pihak (*parties*) diharapkan menyampaikan *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang pertama paling lambat bersamaan dengan penyampaian dokumen ratifikasi, yang nantinya akan dimuat dalam *Public Registry* yang dikelola oleh Sekretariat UNFCCC.

Dukungan internasional terhadap Indonesia dalam penurunan emisi juga sudah dimulai sejak Indonesia menetapkan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dan 41% dari tingkat *business as usual* (BAU) pada tahun 2020. Dukungan terhadap Indonesia untuk mempersiapkan dan melaksanakan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca datang melalui kerjasama internasional bilateral, regional dan multilateral serta melalui skema mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim. Dukungan internasional masuk ke Indonesia melalui berbagai saluran antara lain melalui Pemerintah secara terpusat dan sektoral, pemerintah daerah, NGO's, serta melalui Lembaga Internasional yang berlokasi di Indonesia. Upaya nasional mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak juga melibatkan dukungan sumber daya dalam negeri dari berbagai *stakeholder*, baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, NGOs dan pihak swasta. Tentunya keberagaman

dukungan dan penyalurannya ini apabila tidak ditangani melalui mekanisme koordinasi yang kuat akan menimbulkan inefisiensi dan inefektifitas serta dapat menyebabkan adanya *gap* antara kegiatan (*action*) dan claim dukungan (*support*) dari pihak atau negara yang memberikan support tersebut.

Di samping *Public Registry* yang dikelola Sekretariat UNFCCC, Indonesia juga perlu membangun Sistem Regsitri Nasional (SRN) yang merupakan satu kesatuan dengan MRV *framework*. Pembangunan Sistem Registri Nasional diperlukan sebagai bagian pelaksanaan *transparency framework* Paris. Sistem Registri Nasional (SRN) ini sebagai sarana untuk integrasi aksi dan sumber daya terkait perubahan iklim untuk menghindari *double counting* aksi dan sumber daya serta sekaligus sebagai alat koordinasi dan sekaligus sebagai alat penilai seberapa jauh kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan dengan berbagai dukungan sumber daya.

SRN , bagaimanapun mengandung misi implementasi *good governance*, keterbukaan, dan transparansi informasi. Semua aksi dan sumber daya yang sedang, sudah dan akan berlangsung diharapkan terdaftar Sistem Registri Nasional, sehingga data dan informasi yang tercatat dapat digunakan sebagai basis pelaporan nasional ke Sekretariat UNFCCC. Sebagai negara yang sudah meratifikasi Perjanjian Paris yang mengedepankan transparansi *framework* dalam pemenuhan komitmen dan tanggung jawab kepada dunia internasional dan kepada seluruh masyarakat terkait pengendalian perubahan iklim, sudah saatnya Indonesia mendukung *Public Registry* internasional, dengan membangun Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2016
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

KATA PENGANTAR

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

Aksi adaptasi dan mitigasi serta sumberdaya dalam upaya Pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia memerlukan sinergitas yang kuat antar sektor terkait. Hal tersebut juga disadari pada level internasional yang diinisiasi melalui keputusan COP 16 UNFCCC dengan mengamankan pembentukan *Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) Registry*. Lebih lanjut COP 17 telah memberikan *guidance* lebih detil tentang operasionalisasi registry tersebut. Pada dasarnya Inisiatif registry berfungsi sebagai *tracking system* pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pada tingkat nasional, Indonesia memiliki banyak kerjasama internasional terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui berbagai saluran (pemerintah baik terpusat maupun sektor spesifik atau K/L, Pemerintah Daerah, NGOs, lembaga internasional yang berlokasi di Indonesia, dan saluran lainnya) dapat menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas bila tidak ada koordinasi yang kuat atas semua kegiatan tersebut. Permasalahan sudah sering dihadapi terutama untuk mengetahui status aksi (*actions*) dan dukungan (*supports*) untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pengembangan Sistem Registri Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) berbasis web merupakan sistem untuk pendataan aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia sekaligus dan penyediaan data dan informasi kepada publik. SRN PPI juga sekaligus sebagai alat koordinasi dan alat penilai sekaligus sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik serta *entry point* mengevaluasi target yang ingin dicapai. Pengembangan SRN PPI ini diharapkan dapat mencegah terjadinya duplikasi, *overlap* dan *double counting*, sekaligus mencegah terjadinya ketidaksinkronan antara aksi (adaptasi dan mitigasi) dengan kebutuhan sumber daya (*supports*) sebagai bagian pelaksanaan prinsip *clarity*, *transparency* dan *understanding* (CTU). Sistem ini juga merupakan bentuk pengakuan pemerintah atas kontribusi berbagai pihak terhadap upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia

Untuk mendukung operasionalisasi Sistem Registri Nasional PPI, serta memudahkan para pihak untuk melakukan meregistri aksi dan support serta sekaligus mempermudah publik untuk mengakses informasi, maka diperlukan panduan teknis. Panduan teknis SRN Pengendalian Perubahan iklim ini disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai panduan teknis bagi para pihak untuk dapat menggunakan program aplikasi komputer Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia, dalam rangka menyediakan, menyajikan dan mengakses data dan informasi pelaksanaan aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada website SRN PPI dengan mudah, sehingga tujuannya sebagai *tracking system* pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di Indonesia dapat terpenuhi. Proses pembangunan SRN PPI masih akan terus berlanjut sesuai dengan perkembangan terkini pelaksanaan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim, sehingga Panduan Teknis ini juga akan di-update sesuai dengan perkembangan tersebut.

Demikian panduan teknis ini disusun semoga bermanfaat, khususnya bagi para penggiat perubahan iklim, untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyediaan informasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2016
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc.

I. PENDAHULUAN

A. SRN Pengendalian Perubahan Iklim

Perubahan iklim telah menjadi menjadi fokus pertimbangan dalam perumusan tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Mengingat kerentanan Indonesia akan dampak perubahan iklim, pemerintah mengarusutamakan isu perubahan iklim dalam RPJM 2015-2019 dan selanjutnya mengintegrasikan aksi perubahan iklim dibawah satu entitas kelembagaan Perpres 16 Tahun 2015 tentang pembentukan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, DJ PPI – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPPI) bertindak sebagai *National Focal Point* dalam pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimandatkan melalui Permen P.18/MENLHK-II/2015. DJPPPI bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim, termasuk didalamnya fungsi mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Dibawah koordinasi Ditjen PPI, aksi pengendalian perubahan iklim diarahkan untuk terintegrasi dengan rencana pembangunan berkelanjutan rendah karbon. Sinergitas ini akan berkontribusi dalam menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi Rakyat Indonesia baik di masa kini dan di masa mendatang menuju pembangunan berkelanjutan yang berketahanan iklim.

B. Mengukur Aksi Pengendalian Perubahan Iklim

Kompleksitas penangan perubahan iklim memerlukan pendekatan yang memenuhi unsur keterpaduan, sinergi, konsistensi dan dapat terukur. Aksi pengendalian perubahan iklim akan tepat sasaran dan tepat guna manakala proses dan progresnya dapat terukur, terlacak dan transparan.

Dalam tataran ini basis data dan informasi terkait aksi pengendalian perubahan iklim menjadi penting. Data dengan integritas tinggi baik data statistik, spasial dan administrasi yang tepat dan termuktahirkan akan mampu memberikan gambaran akan kondisi normal dan kondisi riil di lapangan. Data menjadi penting untuk memahami tingkat kesiapan daerah maupun suatu kelompok masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim termasuk untuk melihat apakah intervensi dari suatu program dan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berdampak pada peningkatan ketahanan masyarakat dan penurunan emisi perubahan iklim.

C. Peran Sistem Registri Nasional

Sistem Registri Nasional akan menjadi wadah pengelolaan data dan informasi aksi dan sumber daya Adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Hal ini memungkinkan terwujudnya standarisasi dan integrasi data maupun informasi sehingga mengurangi persoalan data yang selama ini terjadi seperti tantangan akurasi, ketidakmutakhiran, dan inkonsistensi data.

Seiring dengan upaya pengarusutamaan isu perubahan iklim di tingkat kebijakan pemerintah, aksi pengendalian perubahan iklim telah pula diinisiasi oleh berbagai pihak. Ditingkat tapak, masyarakat baik inisiatif mandiri maupun melalui pendampingan mitra turut berkontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Melalui SRN inilah, data dan informasi tentang aksi maupun sumber daya yang merupakan upaya kolektif tersebut dihimpun. Ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah atas kontribusi berbagai pihak dalam upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

D. Tujuan SRN

Sistem Registri Nasional dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1 Pendataan aksi dan sumber daya Adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim di Indonesia.
- 2 Pengakuan pemerintah atas kontribusi berbagai pihak terhadap upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia.
- 3 Penyediaan data dan informasi kepada publik tentang aksi dan sumber daya Adaptasi dan Mitigasi serta capaiannya.
- 4 Menghindari penghitungan ganda (*double counting*) terhadap aksi dan sumber daya Adaptasi dan Mitigasi sebagai bagian pelaksanaan prinsip *clarity, transparency* dan *understanding* (CTU).

E. Tujuan Penyusunan User Manual SRN

1. Sebagai acuan (pedoman) untuk operasionalisasi SRN.
2. Memudahkan publik mengerti tahapan, proses, dan cara kerja Sistem Registri Nasional yang berbasis IT.

II. TAMPILAN PORTAL SRN

A. Halaman Beranda

Tampilan halaman muka (beranda) dari situs Sistem Registri Nasional (SRN) berupaya untuk menjadi wadah penyajian berbagai informasi mengenai semua aksi perubahan iklim yang dilakukan oleh berbagai aktor di wilayah Indonesia, agar dapat dikontekstualisasikan oleh para pemangku kepentingan, baik publik ataupun pembuat kebijakan.

Di halaman Beranda, terdapat beberapa segmen yang menampilkan informasi-informasi yang berbeda yaitu

1. Segmen pengenalan,
2. Segmen grafik informasi,
3. Segmen Statistik Pengguna,
4. Segmen tujuan SRN,
5. Segmen pendaftaran;
6. Segmen informasi dan panduan pendaftaran; dan
7. Segmen informasi DJPPI-KLHK.

1. Segmen Pengenalan

Dalam segmen pengenalan ditampilkan dua paragraf singkat di kiri halaman mengenai tujuan dan alasan dibentuknya Sistem Registri Nasional (SRN). Di bawah paragraf tersebut terdapat 3 (tiga) tombol yaitu:

- Pendaftaran,
- Tentang SRN, dan
- Bantuan.

Tombol-tombol tersebut akan mengarahkan ke halaman yang dituju. Pada bagian kanan halaman Beranda, pengunjung dapat melakukan **login** dengan mengisi *username* dan *password* yang telah didaftarkan.



Gambar 1. Tampilan atas halaman Beranda

2. Segmen Grafik Informasi

Dalam segmen grafik informasi, terdapat 6 (enam) grafik yang menunjukkan 6 (enam) informasi berbeda yaitu : (dari atas ke bawah dan kiri ke kanan)

1. *pie-chart* jumlah kegiatan berdasarkan jenis aksi,
2. *pie-chart* jumlah kegiatan Program Kampung Iklim (PROKLIM) berdasarkan kategori,
3. *pie-chart* jumlah kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim (API) berdasarkan bidang/ sektor),
4. *bar-chart* jumlah penurunan emisi gas rumah kaca berdasarkan Bidang/Sektor,
5. *bar-chart* jumlah dana nasional yang digunakan berdasarkan jenis kegiatan, dan
6. *bar-chart* jumlah dana internasional yang digunakan berdasarkan jenis kegiatan.



Gambar 2. Grafik Informasi pada halaman Beranda

Pengguna dapat mengakses informasi detail dengan meng-klik grafik yang diinginkan. Contoh tampilan informasi detail dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini:

DAFTAR KEGIATAN MITIGASI

[← kembali](#)

Showing 1-20 of 28 items.

#	NOMOR REGISTRASI	JUDUL KEGIATAN	MITRA PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	SKEMA/PELAKU	CAPAIAN PENURUNAN EMISI (RIBU TON CO2E / TAHUN)	HASIL VERIFIKASI PENURUNAN EMISI (RIBU TON CO2E / TAHUN)
1	REG-11-RA-X-2016-0423	Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	• Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, FORCLIME, Korea Forest Services, ITTO, FAO	Direktorat Planologi dan Tata Kelola	Pemerintah Pusat dan Daerah	• 2019 - 20712,55	• 2019 - 15780,94
2	REG-10-RE-X-2016-0422	Persiapan Program Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Program REDD+) di Taman Nasional Berbak	• Balai TN Berbak dan The Zoological Society of London (ZSL)	Taman Nasional Berbak	REDD+	• 2015 - 794,71	• 2015 - 729,06
3	REG-11-RE-X-2016-0409	Forest and Climate Change Programme Financial Corporation (FORCLIME - FC)	• Kerjasama Pembangunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman, Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau • Kerjasama Pembangunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman, Dinas Kehutanan Kabupaten dan KPHH Kapuas-Hulu • Kerjasama Pembangunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman, Dinas Kehutanan Berau	Biro Perencanaan KLHK	REDD+	• 2015 - 1052	• 2015 - 1051

Gambar 3. Contoh halaman Detail Komponen salah satu grafik

3. Segmen Statistik Pengguna SRN

Segmen ini menyajikan empat grafik berbeda warna yang menunjukkan statistik dari pengguna SRN. Dari kiri ke kanan, grafik tersebut adalah:

1. total pendaftar,
2. total kegiatan yang terdaftar,
3. total kegiatan yang tervalidasi (kelengkapan data dan informasi), dan
4. total kegiatan yang terverifikasi (*Clarity, Tranparency, dan Understandable*).

Semua komponen dalam segmen grafik informasi dapat di-klik untuk menunjukkan detail lanjutan dari komponen-komponen yang telah disajikan.



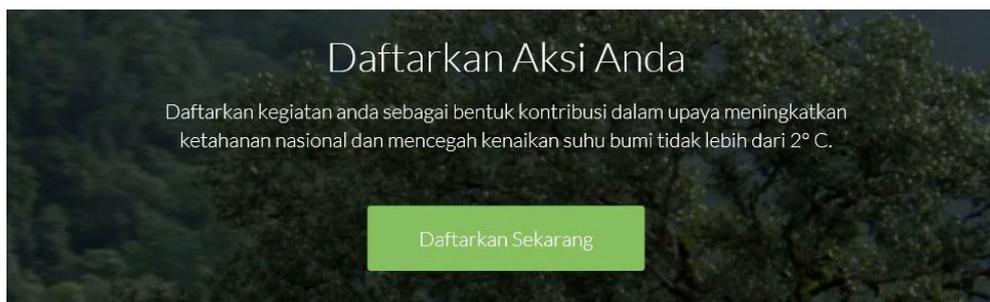
Gambar 4. Tampilan Informasi Pendaftar, Nomor Akun, Nomor Registri dan Terverifikasi.

4. Segmen Tujuan SRN

Dalam segmen tujuan SRN disajikan penjelasan mengenai tujuan dibangunnya SRN yaitu untuk kegunaan pendataan dan kontribusi para pihak, informasi publik dan tujuan untuk tercapainya prinsip *clarity, transparency* dan *understanding (CTU)*.

5. Segmen Pendaftaran

Di dalam segmen pendaftaran, user dapat mendaftarkan aktivitas kegiatan yang dilakukan. Di bagian tengah, terdapat simbol "Daftarkan" yang, jika di-klik, akan mengarahkan pada halaman awal proses pendaftaran SRN.



Gambar 5. Segmen Pendaftaran pada halaman Beranda

6. Segmen Informasi dan Panduan Pendaftaran

Pada segmen informasi dan panduan pendaftaran, di bagian kiri terdapat paragraf yang menghimbau pengunjung untuk membaca panduan pendaftaran terlebih dahulu. Di bawahnya, terdapat tombol "Panduan Pendaftaran" yang akan mengarahkan pengunjung kepada halaman *Frequently Ask Questions (FAQ)*. Pada halaman FAQ ini pengunjung bantuan pemahaman tentang SRN dalam bentuk pertanyaan dan jawaban.

Panduan Pendaftaran dan Pertanyaan yang Sering Diutarakan

Kami berusaha menyajikan tahapan-tahapan dengan singkat dan sederhana. Sebelum mendaftar, silahkan kunjungi panduan tata cara pendaftaran dan pertanyaan yang sering digunakan.

Panduan Pendaftaran

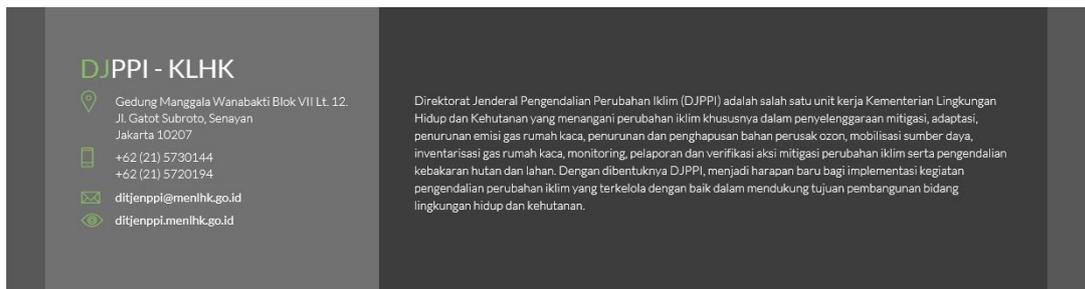


Gambar 6. Tampilan Panduan Pendaftaran pada halaman Beranda

Di bagian kanan dari informasi dan panduan pendaftaran terdapat sebuah video berjudul "Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim" yang menjelaskan secara singkat dasar, tujuan, dan tata cara mendaftarkan sebuah kegiatan dalam Sistem Registri Nasional.

7. Segmen Informasi DJPPI-KLHK

Bagian terakhir pada halaman Beranda adalah segmen informasi DJPPI-KLHK. Pada bagian kanan, terdapat penjelasan mengenai DJPPI, tugas, fungsi dan kewenangan dari DJPPI. Di bagian kiri terdapat serangkaian informasi mengenai bagaimana cara menghubungi DJPPI-KLHK, mulai dari alamat, nomor telepon, email, dan website.



Gambar 7. Tampilan Informasi DJPPI-KLHK

B. Menu dan Halaman-Halaman Lain

Di bagian paling atas situs SRN, disediakan menu utama dari situs SRN. Menu ini dirancang untuk difungsikan untuk mengarahkan pengunjung terhadap halaman-halaman dengan informasi-informasi yang dinilai penting untuk memahami cara operasi dan hasil operasi Sistem Registri Nasional (SRN).



Gambar 8. Menu Utama situs SRN

Dalam menu utama situs SRN, terdapat 6 tautan utama;

1. Beranda,
2. Tentang,
3. Tata Cara,
4. Pendaftaran,
5. Data, dan
6. Login.

Beberapa dari tautan dalam menu (tautan Tentang dan Tata Cara) memiliki submenu tersendiri yang akan, jika diklik, akan mengarahkan pengunjung secara langsung kepada segmen terkait dalam halaman tautan.

1. Halaman Beranda (telah dijelaskan di bagian atas)

2. Halaman Tentang

Dalam tautan Tentang, terdapat 4 segmen yang berbeda, masing-masing menampilkan informasi terkait Sistem Registri Nasional; segmen Tentang SRN Pengendalian Perubahan Iklim, segmen Mengukur Aksi Pengendalian Perubahan Iklim, segmen Peran Sistem Registri, dan segmen Tujuan SRN.

2.1. Segmen Tentang SRN Pengendalian Perubahan Iklim

Dalam segmen ini, dijelaskan secara singkat dalam dua paragraf dasar hukum dan dasar kepentingan bagi Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPP), untuk membangun Sistem Registri Nasional.

2.2. Segmen Mengukur Aksi Pengendalian Perubahan Iklim

Dalam segmen ini dijelaskan mengenai pentingnya sebuah negara/aktor yang berupaya untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap fenomena perubahan iklim melalui intervensi-intervensi kebijakan untuk memiliki data dan informasi yang lengkap dan terintegrasi.

2.3. Segmen Peran Sistem Registri

Dalam segmen ini dijelaskan mengenai bagaimana sebuah Sistem Registri Nasional dapat memenuhi kepentingan pengumpulan, pengolahan, dan

penyajian data suatu aksi yang dilaksanakan dan juga sumber daya yang digunakan untuk suatu negara.

2.4. Segmen Tujuan SRN

Selanjutnya, dalam segmen tujuan SRN, disajikan penjelasan singkat mengenai 4 tujuan dasar SRN; pendataan, kontribusi para pihak, informasi publik, dan prinsip *clarity*, *transparency* dan *understanding*.

3. Halaman Tata Cara

Dalam tautan Tata Cara, terdapat 5 segmen yang berbeda, masing-masing menampilkan informasi terkait tata cara mendaftarkan suatu kegiatan dalam Sistem Registri Nasional; segmen Gambaran Umum Tata Cara, segmen Langkah I (Pendaftaran), segmen Langkah II (*Approval* Data Umum), dan segmen Langkah III (Validasi Data Teknis), dan segmen Langkah IV (Verifikasi Aksi dan Sumber Daya).

3.1. Segmen Gambaran Umum Tata Cara



Gambar 9. Segmen Gambaran Umum Tata Cara pada halaman Tata Cara

Di segmen ini, terdapat sebuah infografis yang menunjukkan alur langkah-langkah yang harus dilalui oleh penanggung jawab aksi jika ia ingin mendaftarkan kegiatannya dalam SRN. Dalam gambar ini juga disajikan sub-langkah yang harus dilakukan dalam masing-masing langkah untuk menuju langkah berikutnya.

Langkah I (Pendaftaran)

Di segmen ini, dijelaskan melalui 5 langkah, bagaimana cara penanggung jawab mendaftarkan diri dan mendapatkan sebuah akun yang dapat dia gunakan untuk masuk ke dalam SRN dan mendaftarkan aksi.

Langkah II (*Approval* Data Umum)

Di segmen ini, dijelaskan melalui 4 langkah, bagaimana proses mendapatkan nomor akun untuk kegiatannya dengan mengisi dan menunggu *approval* formulir data umum.

Langkah III (Validasi Data Teknis)

Di segmen ini, dijelaskan melalui 3 langkah, bagaimana proses mendapatkan nomor registry untuk kegiatannya dengan mengisi dan menunggu validasi formulir data teknis.

Langkah IV (Verifikasi Aksi dan Sumber Daya)

Di segmen ini, dijelaskan melalui 3 langkah, bagaimana proses mendapatkan nomor verifikasi untuk kegiatannya dengan menunggu verifikasi formulir data teknis kegiatan dan data teknis sumber daya yang mereka ajukan.

4. Halaman Pendaftaran

Dalam tautan Pendaftaran pengunjung akan disajikan formulir-formulir yang perlu diisi jika pengunjung berniat untuk melakukan pendaftaran diri terhadap Sistem Registri Nasional dan menjadi penanggung jawab kegiatan. Penjelasan mengenai halaman ini dapat dilihat dalam penjelasan mengenai proses pendaftaran.

5. Halaman Data

Dalam tautan Data, pengunjung akan disajikan sebuah peta interaktif Indonesia yang di atasnya terdapat pointer-pointer kecil berwarna. Pointer tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebuah kegiatan yang telah tervalidasi di titik tersebut. Di bagian kiri halaman Data, terdapat sebuah filter kegiatan-kegiatan yang ditampilkan dalam peta yang disajikan. Terdapat tiga filter yaitu Ruang Lingkup, Skema, dan Bidang. Pengunjung dapat memberikan filter yang sesuai dengan kebutuhannya.



Gambar 10. Tampilan Layar Peta dan Fungsi Filter pada halaman Data

Pengunjung dapat meng-klik pointer tersebut dan memunculkan sebuah kotak dimana pengunjung dapat membaca rangkuman dasar atas kegiatan tersebut. Di bagian bawah kotak tersebut terdapat tombol detail yang akan mengarahkan pada halaman detail yang menampilkan data detail kegiatan. Halaman detail ini dapat dicetak dengan meng-klik tombol PDF yang terdapat dibagian atas.

Enhancing Smallholder Benefits from Reduced Emission from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia

[← kembali](#)[PDF](#)

Tujuan Umum

Mendukung pengembangan kelembagaan dan mekanisme fiskal untuk REDD+ yang menghubungkan implementasi di tingkat nasional dengan tingkat lokal

Tujuan Khusus

Berkontribusi terhadap perancangan dan pemilihan opsi - opsi distribusi manfaat REDD+ hingga tingkat masyarakat sehingga dapat menyediakan informasi bagi pengambil kebijakan dalam menentukan mekanisme pendanaan REDD+ yang efektif efisien dan berkelanjutan

Informasi Kegiatan

Nomor Registri

REG-11-RE-X-2016-0414

No.Lokasi

Mitra

Gambar 11. Contoh halaman Data Detail Kegiatan

6. Halaman Login

Jika pengunjung mengklik tautan login, pengunjung akan dikembalikan ke halaman beranda dimana pengunjung dapat melakukan login dengan mengisi *username* dan juga *password* yang pengunjung miliki sebagai penanggung jawab aksi di bagian kanan halaman.

III. PENUTUP

Dengan disusunnya manual ini diharapkan publik dapat memahami proses, tata acara, data dan informasi aksi (kegiatan) dan sumberdaya yang sudah dilaksanakan untuk pengendalian perubahan iklim di Indonesia, yang terpotret dalam Sistem Registri Nasional.

Sistem ini masih akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan kegiatan mitigasi, adaptasi, *joint mitigasi* dan adaptasi serta mobilisasi sumberdaya di Indonesia. Sistem ini dikembangkan secara bertahap menuju terbangunnya transparansi *framework* sebagaimana yang digariskan di dalam *Paris Agreement*.



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
2016